



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh peneliti bernama Aimee Dawis tahun 2010. Penelitian berbentuk disertasi buku dengan judul *Tionghoa – Indonesia mencari jati diri*. Penelitian ini tentang bagaimana masyarakat etnis Tionghoa Indonesia menggali kesadaran jati diri atau kolektif pasca Orde Baru (1965-1998). Dawis meneliti mengapa film dan serial TV Tiongkok digemari oleh generasi yang lahir dibawah 1966 dan makna apa yang diperoleh setelah menonton serial tersebut.

Tujuan dari penelitian Dawis adalah mencermati kaitan antara orang Indonesia-Tionghoa dan ingatan kolektif mereka yang diciptakan oleh konsumsi media. Penelitian Dawis bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data *native ethnography* dan *forum group discussion*. Teori yang digunakan adalah ingatan kolektive Maurice Halbwach dengan konsep media, ingatan kolektif, dan jati diri. Dawis meminta responden untuk menonton serial TV dan film Tiongkok kemudian responden diminta untuk memaknai adegan film.

Pada salah satu adegan seseorang sedang membawa hio sebagai alat persembahan kepada dewa. Adegan tersebut membuat responden beragama Buddha merasa hio adalah bagian dari tradisi keluarga sementara responden beragama Kristen, menganggap hio hanya sebagai wewangian saja bukan sebagai alat persembahan. Pada

adegan judi responden memaknainya sebagai bentuk dari KKN yang tidak pernah lenyap dan sebagai representasi Tionghoa di Indonesia. Salah satu KKN tersebut biaya administrasi pembuatan KTP sebesar 5 ribu rupiah yang diberikan kepada petugas untuk kemudian, dikurangi 300 rupiah yang diberikan kepada pemerintah sebagai lambang transaksi bisnis. Perbedaan makna juga dibedakan berdasarkan gender yang pertama, laki-laki menganggap keberadaan geng dalam film menandakan persaudaraan sementara responden perempuan lebih memandang aktor Tiongkok sebagai idola mereka. Dawis lebih fokus menggunakan film dan serial TV Tiongkok karena dianggap mempunyai kesamaan dengan budaya Tionghoa di Indonesia.

Keterkaitannya dengan penelitian Dawis adalah menelusuri makna dari identitas etnis Tionghoa yang mengalami diskriminasi melalui ingatan masa lalu. Antara penulis dengan Dawis sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan paradigma konstruktif sebagai landasan. Dawis tidak menggunakan wartawan Tionghoa sebagai subjek penelitian melainkan etnis Tionghoa dengan profesi lain.

Penelitian kedua dilakukan oleh Chong Wu Ling dengan judul *Democratisation and Ethnic Minorities: Chinese - Indonesians in Post Suharto Indonesia* tahun 2014. Tujuan dari penelitian Ling adalah untuk menggali bagaimana pebisnis etnis Tionghoa telah beradaptasi dengan lingkungan yang demokratis setelah 1998. Penelitian Ling bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, indepth interview, dan observasi. Teori yang digunakan adalah teori agensi struktur Anthony

Giddens dan teori habitus Pierre Bordieu dengan konsep bisnis etnis Tionghoa di Medan dan Surabaya, pemerintah daerah, dan partai politik. Ling menganggap Medan dan Surabaya adalah dua kota yang mempunyai populasi Tionghoa terbesar di Jawa dan Sumatera. Pada Orde Baru etnis Tionghoa dianggap sebagai kelompok yang dekat dengan kekuasaan dan uang yang mengakibatkan persepsi buruk masyarakat terhadap Tionghoa. Ling menjelaskan jika etnis Tionghoa adalah korban dari pemerasan Orde Baru untuk melancarkan kepentingan politiknya.

Ling ingin menelusuri apakah praktik pemerasan terhadap etnis Tionghoa masih terjadi di Surabaya dan Medan. Di Medan Ling menemukan praktik pemerasan terhadap etnis Tionghoa masih terjadi hingga saat ini yang dilakukan oleh organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila, Asosiasi Pemuda Dinas Pekerjaan, dan oknum angkatan bersenjata. Uang hasil pemerasan disebut sebagai uang keamanan atau uang persahabatan antara pengusaha dan organisasi yang bersangkutan jika tidak membayar, organisasi yang bersangkutan akan membongkar paksa toko.

Di Surabaya Ling menemukan pengusaha Tionghoa sengaja membayar 500 ribu rupiah kepada etnis Madura untuk melindungi usaha mereka. Etnis Madura dianggap bisa melindungi usaha Tionghoa karena ahli dalam bertarung dan bisnis dari sinilah, Ling menemukan adanya simbiosis mutualisme antara hubungan Tionghoa dan Madura di Surabaya. Ling menyimpulkan jika praktik pemerasan terhadap Tionghoa masih terjadi hingga sekarang tetapi dengan perbedaan yang signifikan diantara dua kota.

Keterkaitan dengan penelitian Ling adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan paradigma konstruktif sebagai landasan penelitian. Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka yang dilakukan oleh Ling.

Penelitian ketiga berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Debora Christianty dengan judul *Makna Profesi Peliputan Konflik: Studi Fenomenologi Jurnalis Foto Dalam Peliputan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998*. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana fenomenologi menjelaskan mengenai peliputan yang dilakukan oleh jurnalis foto dalam suasana konflik. Penelitian Christianty bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data *indepth interview* dan studi pustaka. Christianty juga menggunakan paradigma konstruktivisme dan fenomenologi deskriptif sebagai metode penelitian.

Teori yang digunakan adalah fenomenologi Husserl dengan konsep jurnalisme liputan konflik, konflik SARA di Indonesia, dan jurnalis foto. Dari dua partisipan yang diwawancarai Christianty menemukan dalam melakukan liputan kerusuhan wartawan foto tidak boleh berpikir terlalu panjang karena dapat menghambat kinerja wartawan foto itu sendiri. Liputan kerusuhan berbicara soal spontanitas jika ada massa yang menjarah wartawan foto hanya membiarkan saja dan tetap melaksanakan tugas wartawan. Pada liputan kerusuhan wartawan tidak boleh terbawa perasaan secara psikologis karena akan mempengaruhi kinerja wartawan.

Sebagai wartawan foto menjalin pertemanan adalah hal penting karena pertemanan dapat bermanfaat saat kondisi tertentu. Salah satu informan Christianty mengatakan pertemanan dengan TNI membuat informan merasa aman saat meliput kerusuhan 1998. Sementara informan lain mengatakan wartawan dapat menjadi korban kekerasan dari aparat keamanan karena siapa saja dapat mengaku menjadi wartawan kesimpulannya, wartawan foto harus menyusun rencana dan persiapan terlebih dahulu sebelum melakukan liputan lapangan.

Peristiwa 1998 digunakan oleh penulis dan penelitian Christianty dalam latar belakang penelitian begitu pula dengan jenis, sifat, paradigma, dan metode. Fenomenologi deskriptif menjadi persamaan lain antara penulis dengan penelitian Christianty. Dari tiga penelitian terdahulu yang digunakan penulis, penelitian kedua yang berjudul *Democratisation and ethnic minorities: Chinese Indonesians in post-Suharto Indonesia* oleh Chong Wu Ling dan penelitian ketiga dengan judul *Makna Profesi Peliputan Konflik: Studi Fenomenologi Jurnalis Foto Dalam Peliputan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998* oleh Deborah Christianty digunakan oleh penulis sebagai acuan metode penelitian.

Penelitian Ling dan Christianty mempunyai metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis. Ling menggunakan metode teknik pengumpulan data *indepth interview* dan studi pustaka sementara itu, Christianty menggunakan metode fenomenologi deskriptif dan *indepth interview* untuk mengumpulkan data.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti, Asal, dan Tahun Penelitian	Aime Dawis, Ph.D.	Chong Wu Ling	Deborah Christianty
Judul Penelitian	Orang Indonesia-Tionghoa mencari identitas	<i>Democratisation and ethnic minorities: Chinese Indonesians in post-Suharto Indonesia.</i>	Makna Profesi Peliputan Konflik: Studi Fenomenologi Jurnalis Foto Dalam Peliputan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.
Masalah Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makna apa yang diperoleh remaja Tionghoa ketika mengkonsumsi film Tiongkok ?. 2. Bagaimana melalui ingatan kolektif mereka tumbuh dewasa di lingkungan media ini kelompok orang ini menegosiasikan identitas budaya dan bangsa mereka?. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pebisnis etnis Tionghoa telah beradaptasi dengan lingkungan yang demokratis setelah 1998 ?. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana media melihat sebuah konflik, apa saja tugas yang harus dilakukan oleh jurnalis foto ? bagaimana konflik SARA di Indonesia khususnya kerusuhan Mei 1998 dilihat oleh para jurnalis foto 2. Bagaimana fenomenologi

			menjelaskan mengenai peliputan yang dilakukan oleh jurnalis foto dalam suasana konflik ?.
Tujuan Penelitian	Untuk mencermati kaitan antara orang Indonesia-Tionghoa dan ingatan kolektif mereka yang diciptakan oleh konsumsi media.		1. Untuk mengetahui bagaimana media meliput sebuah konflik, apa saja tugas yang harus dilakukan oleh jurnalis foto. Lalu bagaimana konflik SARA di Indonesia khususnya peristiwa Mei 1998 dilihat oleh para jurnalis foto.

<p>Jenis, Sifat, dan Metode Penelitian</p>	<p>Konstruktivisme, kualitatif, <i>native ethnography</i></p>	<p>Konstruktivisme, kualitatif, studi pustaka, dan observasi.</p>	<p>Kualitatif, konstruktivisme, dan fenomenologi deskriptif.</p>
<p>Teori dan Konsep</p>	<p>Teori: ingatan kolektive Maurice Halbwach. Konsep: media, ingatan, dan jati diri</p>	<p>Teori: agensi struktur Anthony Giddens dan teori habitus Pierre Bordieu. Konsep: etnis Tioghoa, bisnis etnis Tionghoa di Surabaya dan Medan, pemerintah daerah dan partai politik.</p>	<p>Teori: fenomenologi Konsep: jurnalisme liputan konflik, konflik SARA di Indonesia, jurnalis foto.</p>

2.2 Teori atau Konsep-Konsep yang Digunakan

2.2.1 Teori Identitas Sosial

Menurut Hogg & Abram (1998) teori identitas sosial adalah proses pembentukan identitas dari suatu individu melalui, struktur sosial yang tercipta dalam masyarakat. Masyarakat melakukan penggolongan terhadap individu melalui kelas sosial, gender, etnis dan ras, dan agama yang dianut oleh individu sehingga menentukan hubungan sosial antarkelompok masyarakat (dalam Susetyo, 2002, p. 4) Identitas sosial suatu kelompok individu dibentuk oleh masyarakat melalui perlakuan sosial yang dilakukan oleh masyarakat tertentu sehingga menimbulkan stereotip terhadap kelompok individu. Stereotip adalah pelabelan terhadap suatu kelompok individu yang membentuk identitas dari kelompok individu. Stereotip adalah hal yang lumrah dalam masyarakat (Susetyo, 2002, p. 4)

Menurut Reid & Gilles (2008) teori identitas sosial adalah teori untuk menjelaskan fakta tentang diskriminasi dan prasangka yang terjadi di masyarakat, bekerja melalui gerakan harmonisasi yang sama untuk memahami dan mengatasi konflik (dalam Fajar, 2016, p.136). Proses diskriminasi muncul karena adanya satu kelompok yang mencari persamaan dengan kelompok lainnya dan kelompok mencari perbedaan dari kelompok lain (dalam Fajar ,2016, p.136). Teori identitas sosial menekankan bahwa ada upaya menemukan persamaan dan mencari perbedaan dalam

kelompok lain. Pada dasarnya kelompok masyarakat tersebut diikat dengan solidaritas yang tinggi untuk meningkatkan kohesivitas dalam kelompok (Fajar, 2016, p.136). Kelompok masyarakat akan mencari perbedaan di kelompok lain dan menyebabkan adanya konflik antarkelompok. Perbedaan tersebut terjadi secara signifikan sehingga diskriminasi terhadap kelompok lain tak terhindarkan.

Teori identitas sosial menjelaskan juga konflik bisa muncul karena adanya suatu perbedaan kepentingan dengan kelompok lain (Fajar, 2016, p.137-138). Kelompok tersebut terbagi dalam tiga status sosial yaitu mobilitas identitas sosial, kompetisi sosial, dan kreativitas sosial. Reid (2009) menyebutkan yang pertama adalah mobilitas sosial adalah upaya individu untuk mengangkat identitas positif dari suatu kelompok kedua, adalah kompetisi sosial yaitu meningkatnya perlawanan kelompok minoritas terhadap kelompok mayoritas. Ketiga adalah kreativitas sosial yaitu upaya kelompok sosial untuk meningkatkan kemampuan melawan kelompok mayoritas (dalam Fajar, 2016 , p.137).

Penjelasan ini menekankan bahwa perbedaan terjadi karena adanya persaingan dan menonjolkan perbedaan antarkelompok. Secara langsung dapat meningkatkan konflik antarkelompok di masyarakat dan perbedaan kekuatan antarkelompok membuat konflik semakin tak terhindarkan (Fajar, 2016 , p.13). Untuk menyelesaikan konflik antarkelompok dapat digunakan pemahaman mengenai perbedaan identitas sosial, dalam penelitian Susetyo menemukan hal yang berbeda. Kelompok dominan di Indonesia mendiskriminasi etnis Tionghoa yakni, kelompok dominan menekan

keberadaan dan ruang gerak etnis minoritas. Tindakan yang dilakukan kelompok dominan yaitu, tindakan Orde Baru yang melarang eksistensi budaya Tionghoa. Dalam propagandanya Orde Baru menggunakan isu komunis sebagai akarnya. Dengan demikian terjadilah diskriminasi hingga pelanggaran HAM terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Pelanggaran HAM tersebut adalah pembakaran toko dan pelecehan seksual.

Diskriminasi adalah bagian dari perlawanan kelompok mayoritas terhadap etnis Tionghoa di beberapa daerah di Indonesia. Untuk menyelesaikan konflik antarkelompok perlu digunakan pemahaman sosial terhadap kelompok yang minoritas. Kelompok mayoritas perlu memahami peran etnis Tionghoa dalam mengelola demokrasi dan birokrasi tetapi, hal tersebut sulit diterima oleh masyarakat karena beberapa orang Tionghoa telah dijadikan sasaran korup dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Orde Baru (Ling, 2014, p.18).

Menurut Erikson (1989) identitas memiliki kaitan dengan sosial individu. Identitas dibentuk dari permulaan kehidupan sosial individu. Kehidupan sosial memiliki tingkatan yang, menghasilkan realitas sosial. Istilah lain identitas membentuk kesamaan diri yang sifatnya permanen. Identitas adalah proses secara bertahap yang terjadi pada individu dan, membentuk jati diri seseorang (dalam Ubed, 2002, p. 38-39). Identitas yang digunakan penulis adalah identitas budaya, yang terkait dengan etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam melakukan adat istiadat asal leluhur sehingga menjadi, sesuatu yang melekat dan menjadi kebiasaan yang diturunkan oleh orang tua. Adat istiadat Tionghoa memiliki perbedaan berdasarkan marga keluarga.

Etnis Tionghoa selalu diasosiasikan sebagai pelaku di bidang ekonomi. Etnis Tionghoa dikenal dengan keahlian dalam mengelola sebuah perusahaan, perusahaan yang dikelola oleh etnis Tionghoa turut membangun perekonomian Indonesia (Suryadinata, 2016, p.347). Bidang ekonomi sudah menjadi identitas sosial etnis Tionghoa sejak era kolonial. Pada awal abad ke-20 muncul koran *Sin Po* sebagai koran nasionalis. Kemunculan koran *Sin Po* perlahan mengubah identitas etnis Tionghoa sebagai pedagang menjadi pelaku pers. Koran *Sin Po* turut membantu pembentukan identitas dan keragaman bangsa Indonesia (Suryadinata, 2016, p. 347).

Koran *Sin Po* turut membantu bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Koran *Sin Po* turut mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang merugikan Indonesia (Suryadinata, 2010, p. 341). Berdasarkan autobiografi Kwee Kek Beng menulis bahwa Ir.Sukarno pernah datang ke kantor mereka dan meminta agar tulisannya diterbitkan (Suryadinata, 2010, p. 343). Koran *Sin Po* perlahan mengubah identitas sosial etnis Tionghoa di kalangan pribumi, kemunculan media Tionghoa - Indonesia menandakan bahwa etnis Tionghoa berperan dalam memajukan media.

Wartawan dari etnis Tionghoa mulai memperlihatkan eksistensinya di tengah kolonialisme Belanda. Wartawan etnis Tionghoa saat itu adalah Kwee Kek Beng, Lauw Giok Lan, Ang Yang Goan, Yoe Sin Gie (Suryadinata, 2010, p. 341- 343). Selain *Sin Po* ada beberapa media yang berorientasi pada Tionghoa yaitu *Sin Tit Po*, *Keng Po*, *Li Po*, dan *Kabar Perniagaan*. Dengan munculnya lima media Tionghoa – Indonesia, semakin menambah keragaman pers di Indonesia.

Proses pembentukan identitas etnis Tionghoa terjadi melalui struktur sosial. Struktur sosial pemerintah kolonial Belanda menempatkan etnis Tionghoa sebagai pedagang. Struktur sosial turut membangun persepsi masyarakat terhadap etnis Tionghoa (Hogg & Abram, 1998 sebagaimana yang dikutip oleh Susetyo, 2002, p.4). Persepsi masyarakat adalah etnis Tionghoa sebagai pedagang kaya raya dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah dan elite. Namun hubungan tersebut tidak benar terjadi karena beberapa etnis Tionghoa telah dijadikan sasaran korup dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Orde Baru (Ling, 2014, p.18).

Masyarakat menganggap jika etnis Tionghoa dekat dengan kekuasaan dan uang oleh sebab itu etnis Tionghoa dianggap sebagai kelompok asing eksklusif. Maka dari itu keberadaan etnis Tionghoa sulit diterima oleh masyarakat dan, berdampak dengan pembentukan identitas dalam lingkungan sosial. Hal tersebut berdampak pula terhadap wartawan etnis Tionghoa yang berpotensi menjadi sasaran diskriminasi kelompok tertentu. Identitas etnis adalah hal yang cukup sensitif dalam struktur sosial sehingga bisa menjadi sumber permasalahan. Identitas etnis dapat disalahgunakan oleh orang lain sebagai bentuk kebencian terhadap suatu kelompok

Pada 1965 dimana pers berbasis Tionghoa menjadi korban dari kondisi sosial politik yang memanas. Pemerintah menutup semua media berbasis Tionghoa dan membatasi kebebasan berpendapat etnis Tionghoa. Akibat dari kebijakan Orde Baru terhadap Tionghoa saat itu mengakibatkan, sulitnya keberadaan media Tionghoa maupun wartawannya.

Berikut adalah faktor yang mempengaruhi keberadaan wartawan etnis Tionghoa di Indonesia:

1. Pada saat tiba di Indonesia mayoritas dari etnis Tionghoa adalah pedagang dan buruh angkut. Sejak saat itu banyak dari etnis Tionghoa yang mempunyai badan usaha di Indonesia seperti usaha makro dan mikro (Musianto, 2003, p. 197). Badan usaha milik etnis Tionghoa mempunyai kedekatan dengan pejabat kolonial saat itu kemudian, menjadikan etnis Tionghoa sebagai kaki tangan dari pemerintah kolonial.
2. Karena kemampuan dalam bidang ekonomi etnis Tionghoa mendapat perlakuan yang berbeda dari masyarakat. Secara umum masyarakat menganggap etnis Tionghoa sebagai kelompok eksklusif yang hanya ahli dalam bidang ekonomi saja. (Dawis, 2010, p. 21).
3. Pemerintah Belanda membuat tempat tinggal khusus etnis Tionghoa atau disebut dengan pecinan yang menjadi ciri khusus Tionghoa. Pada saat etnis Tionghoa jauh dari lingkungan komunitas maka, ada kemungkinan mengalami krisis identitas diri yang disebabkan oleh lingkungan baru diluar pecinan. Dalam konteks ini masyarakat melakukan penggolongan terhadap ras, gender, dan identitas terhadap etnis Tionghoa oleh sebab itu lingkungan turut berpengaruh dalam pembentukan identitas etnis Tionghoa. (Dalam Hogg dan Abram, 1998 sebagaimana yang dikutip oleh Susetyo, 2002, p.4).

4. Puncak diskriminasi terhadap Tionghoa terjadi pada Orde Baru dan mengakibatkan hilangnya nilai ketionghoan seseorang. Saat itu beberapa Tionghoa menjadi kerabat bisnis Presiden Soeharto yang menimbulkan anggapan bahwa etnis Tionghoa adalah kelompok oportunistik (Ling, 2014, p.18). Ungkapan tersebut juga berdampak terhadap etnis Tionghoa yang tidak berprofesi sebagai pengusaha seperti wartawan. Wartawan Tionghoa turut menjadi korban diskriminasi yang diakibatkan oleh stereotip yang beredar luas di masyarakat mengenai etnis Tionghoa.

Kondisi sosial politik mengakibatkan pribumi sulit menerima keberadaan etnis Tionghoa. Propaganda orde baru yang mengakibatkan asimilasi budaya membuat etnis Tionghoa tidak menjalankan tradisi leluhur. Kebijakan Orde Baru tidak memengaruhi keadaan sosial dimasyarakat namun, membuat etnis Tionghoa semakin terdesak (Ubed, 2002, p. 38- 39) .

Kondisi sosial membangun identitas etnis Tionghoa secara perlahan. Kondisi sosial menciptakan realitas di masyarakat mengenai etnis Tionghoa yaitu, kelompok masyarakat yang mengucilkan etnis Tionghoa dengan latar belakang sentimen. Sentimen yang terjadi selama puluhan tahun perlahan membentuk identitas etnis Tionghoa. Identitas tersebut adalah hilangnya jati diri siapa sesungguhnya etnis Tionghoa, apakah masih dianggap sebagai bagian dari Indonesia atau orang asing di negeri sendiri (Ubed, 2002, p. 38- 39).

Identitas diri yang dibangun oleh rezim Orba membuat kehilangan jati diri. Tanda dari kehilangan identitas diri adalah menghilangkan budaya dan mengubah nama. Penghilangan identitas berdampak pada profesi yang diambil etnis Tionghoa, beberapa dicap sebagai antek PKI dan asing (Dawis, 2010, p. 109).

Wartawan etnis Tionghoa berpotensi mendapat perlakuan diskriminasi. Kasus yang terjadi adalah kasus secara verbal yaitu rasisme melalui perkataan. Rasisme merujuk pada identitas etnis Tionghoa yaitu Aseng dan antek PKI, hal ini bisa berujung pada stereotip yang selama ini melekat pada etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dikatakan sebagai etnis yang oportunistis, eksklusif, dan kaya raya (Ling, 2014, p. 18).

Saat ini tidak semua etnis Tionghoa menjadi pengusaha ada pula yang menggeluti jurnalistik. Wartawan adalah profesi yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah. Wartawan bertemu banyak orang dan berkomunikasi dengan masyarakat (Munir, 2017, para.1). Tugas wartawan adalah mencari informasi dan memberikannya kepada masyarakat. Narasumber tidak seharusnya memandang etnis dari mana wartawan berasal.

Wartawan yang mengalami intimidasi saat liputan dinilai menghalangi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Wartawan dan media bersifat universal dan tidak memihak pada etnis tertentu (Day, 2006, p. 429). Tetapi ada kemungkinan pula media melakukan diskriminasi melalui pemberitaan yang menghasilkan berita bias dan tidak hanya terjadi pada etnis Tionghoa saja. Maka dari itu media dapat terbawa narasi struktur sosial yang ada di masyarakat.

Penerimaan identitas wartawan Tionghoa oleh masyarakat masih sulit. Akibat dari identitas diri yang dibangun oleh rezim Orba, membuat wartawan Tionghoa sulit menjalani profesi sebagai wartawan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sulit menerima keberadaan etnis Tionghoa (Ubed, 2002, p. 38- 39). Sementara wartawan adalah profesi yang diwajibkan turun ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat. Jika masyarakat sulit menerima keberadaan wartawan etnis Tionghoa maka akan menimbulkan trauma bagi wartawan. Demikian pula jika media sendiri tidak memiliki perspektif yang benar mengenai keberagaman. Kemajemukan di dalam redaksi dibutuhkan saat ini tetapi masih ada media yang melakukan diskriminasi terhadap wartawan sendiri. Seperti tidak beragamnya etnis wartawan di dalam redaksi maka akan sulit menemukan sudut pandang yang berbeda dari setiap etnis.

2.2.2 Teori Hegemoni Budaya

Menurut Gramsci (2002) tindakan politik yang mengarah terhadap suatu subjek tidak bisa diidentifikasi dengan kelas-kelas sosial, setelah timbul keinginan kolektif atau rasa persamaan lalu akan timbul ideologi baru yang menciptakan ekspresi politik (dalam Hutagalung, 2004, p. 13). Hegemoni adalah tindakan memolitisasi kelompok masyarakat untuk menjalankan aturan yang, di politisasi oleh rezim pemerintahan suatu negara. Tujuannya untuk menjalankan ekspresi kepentingan politik negara dengan, memaksa kelompok tertentu untuk mengikuti aturan yang berlaku (Hutagalung, 2004, p . 13).

Menurut Gramsci (2002) pergolakan sub-altern dibangun diatas premis pentingnya ide dan tidak mencukupi kekuatan fisik saja. Dengan demikian etnis Tionghoa harus menginternalisasi nilai dan norma yang diterapkan oleh rezim orde baru. Etnis minoritas mengikuti aturan yang ditetapkan untuk, mengendalikan situasi sosial dan politik di Indonesia (dalam Suryawan, 2010, p. 124-125). Etnis Tionghoa di Indonesia mendapat perilaku diskriminasi, dimana rezim orde baru mengontrol keadaan sosial politik negara dengan, membuat propaganda anti Tionghoa. Kemunculannya ditandai dengan peraturan yang melarang ekspresi budaya Tionghoa. (Dawis, 2010, p.108).

Jika mengacu Gramsci (2002), etnis Tionghoa menginternalisasi nilai-nilai dan norma yang diterapkan oleh penguasa, dengan mengubah nama Tionghoa menjadi nama Indonesia agar diterima oleh identitasnya sebagai pribumi. Akibatnya identitas sebagai keturunan Tionghoa hilang. Cara lain untuk mengubah identitas adalah berpindah keyakinan dan meninggalkan tradisi dari leluhur (dalam Suryawan, 2010, p. 124-125).

Kondisi sosial politik di Indonesia memosisikan etnis Tionghoa sebagai orang luar propaganda. Tujuannya untuk mempersuasi kelompok masyarakat yang memosisikan etnis Tionghoa sebagai orang asing (Dawis, 2010, p. 109). Akibatnya etnis Tionghoa sulit untuk bergabung dengan masyarakat lain. Pada orde baru etnis Tionghoa sulit untuk menduduki kursi pemerintahan. Kecuali memiliki kekerabatan dengan pemerintah orba (Ling, 2014, p. 18).

Untuk menghindari diskriminasi etnis Tionghoa mengikuti aturan yang dibuat oleh penguasa. Diskriminasi timbul dari masyarakat yang “dipersuasi” oleh rezim orde baru. Dengan demikian membentuk konstruksi etnis Tionghoa bukan bagian dari Indonesia. Akibatnya etnis Tionghoa kehilangan identitas diri sebagai bagian dari Indonesia. Hingga era reformasi masih ada diskriminasi terhadap etnis Tionghoa (Dawis, 2010, p. 109).

Kerusuhan Mei 1998 adalah puncak dari keirian sosial dan kemarahan rakyat Indonesia terhadap pemerintah. Hal tersebut adalah pemicu massa untuk membakar dan menjarah aset milik etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa menjadi korban saat itu bahkan, pemerkosaan hingga pembunuhan terhadap perempuan etnis Tionghoa. Akibat dari peristiwa tersebut timbul rasa trauma yang dialami hingga saat ini.

Publik menganggap kehadiran wartawan etnis Tionghoa sama dengan etnis Tionghoa biasa. Wartawan etnis Tionghoa dianggap mengganggu dan asing di tengah masyarakat. Kasus Sen Tjiauw tahun 1998 adalah contoh dari sentimen terhadap kehadiran wartawan etnis Tionghoa. Untuk itu Sen Tjiauw menutupi fisiknya dengan topi dan kacamata hitam, dengan begitu Sen Tjiauw “mengubah diri” seolah pribumi (Gustafsson, 2014, para.3).

Situasi sosial dan politik turut mempengaruhi rasisme terhadap etnis Tionghoa. Tahun 1998 adalah puncak krisis ekonomi Indonesia kemudian, terjadi kerusuhan di sejumlah kota besar (Dawis, 2010, p. 34). Kerusuhan di Jakarta adalah kerusuhan

terparah dan banyak memakan korban. Etnis Tionghoa menjadi sasaran amuk massa saat itu, tak terkecuali wartawan yang sedang bertugas di lapangan.

Pejabat negara juga rentan dalam melakukan diskriminasi. Pejabat negara adalah bagian kelompok dominan yang menciptakan kebijakan untuk masalah Tionghoa di Indonesia. Kebijakan tersebut menarasikan diskriminasi etnis Tionghoa yang kemudian mempengaruhi kelas sosial Tionghoa di masyarakat. Narasi kebencian turut mempengaruhi keberadaan wartawan dari etnis Tionghoa yang rentan menjadi korban diskriminasi rasial. Pada saat tertentu kelompok dominan dapat menggunakan media sebagai alat politisasi untuk menarasikan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Oleh sebab itu pemberitaan yang dikeluarkan oleh media bersifat bias atau tidak netral karena penyalahgunaan media.

2..2.3 Wartawan

Definisi wartawan adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik yaitu membuat laporan terkait dengan peristiwa yang sedang terjadi atau sudah lampu kemudian berita akan dimuat dalam media massa seperti koran, majalah, televisi dan radio. Wartawan terdiri dari beberapa bagian yaitu *reporter*, *photographer*, *videographer* dan editor (Munir, 2017, para.1).

Wartawan adalah sebuah pekerjaan yang mengandalkan kemampuan komunikasi karena wartawan, akan bertemu orang banyak ketika turun ke lapangan dan yang paling utama dari wartawan adalah harus memiliki pengetahuan umum dan

bisa menyajikan berita dengan baik di Indonesia, wartawan adalah profesi yang diterima secara luas oleh pemerintah dan masyarakat. Siapa pun masyarakat Indonesia bisa menjadikan wartawan sebagai profesi artinya siapa pun boleh menjadi wartawan asalkan tujuannya demi kepentingan publik. Kondisi pers di Indonesia saat ini dikatakan bebas. Wartawan tetap memiliki suatu lembaga yang mengatur proses kerja liputannya. Dengan demikian dibuatlah aturan mengenai kode etik jurnalistik tujuan dari aturan ini adalah, membatasi perilaku wartawan selama melakukan tugas dari kantor media.

Etnis Tionghoa mempunyai peran dalam perkembangan sejarah pers di Indonesia. Keberadaannya dapat dibuktikan dengan eksistensi koran *Sin Po*, *Keng po*, dan *Sin Tit Po*. Era tersebut dinamakan era pers peranakan dimana, wartawan etnis Tionghoa turut berperan dalam dunia pers. Wartawan tersebut ialah Kwee Kek Beng, Lauw Giok Lan, Ang Yang Goan, Yoe Sin Gie (Suryadinata, 2010, p. 341 – 343).

Pers peranakan turut membantu Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Eksistensi etnis Tionghoa di dunia pers meredup pada saat orde baru. Pasca G30 dan terbitnya propaganda anti Tionghoa, beberapa media Tionghoa ditutup dan dilarang terbit (Suryadinata, 2010, p. 341 – 343). Pada rezim orde baru wartawan tidak memiliki kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Jika melanggar wartawan dan medianya akan dikenai sanksi oleh rezim Orba. Pada saat itu banyak media dan wartawan yang keluar masuk penjara karena mengkritisi pemerintah orde baru.

Izin pendirian pers berada di bawah kendali kementerian penerangan melalui SIUPP. Jika media melanggar pemerintah akan mencabut SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) . Dengan demikian etnis Tionghoa yang berprofesi sebagai wartawan mengalami dua hal yaitu, pembatasan ruang berpendapat dan SARA (Suku Ras Agama dan Antar Golongan) yang dialami saat liputan. Setelah Orde Baru masih ada wartawan yang mengalami SARA akibat dari hilangnya identitas sebagai etnis Tionghoa.

Setelah Orde Baru berakhir kondisi media bebas tetapi ada beberapa media yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Pemberitaan yang diskriminatif akan menghasilkan berita yang bias dan itu, tidak hanya terjadi pada etnis Tionghoa tetapi berlaku bagi etnis lain. Media terbawa oleh arus diskriminasi yang dinarasikan oleh kelompok dominan yang kemudian, menjadi agen pembentuk identitas etnis minoritas melalui pemberitaan yang bias. Pada lingkungan masyarakat identitas dibentuk melalui gender, ras, dan agama yang membentuk hubungan antar individu oleh sebab itu diskriminasi sulit dihindari oleh kelompok minoritas (Hogg & Abram, 1998 dalam Susetyo, 2002, p.4)

Pada kasus diskriminasi kelompok dominan mengambil peran penting karena menciptakan kebijakan diskriminatif. Kelompok dominan membangun narasi secara struktural dan menciptakan kondisi yang memihak kelompok dominan itu sendiri. Hukum diciptakan oleh kelompok dominan untuk menjalankan ekspresi politik dengan cara memaksa kelompok tertentu mengikuti hukum yang berlaku (Gramsci, 2002 dalam Hutagalung, 2004, p. 13).

Pemberitaan yang tidak netral dinilai sebagai *setting* dari media untuk kepentingan media itu sendiri. Oleh sebab itu media adalah perwakilan dari publik yang menyuarakan pendapat terutama, kelompok minoritas yang selama ini tidak mendapat perlakuan yang sama. Salah satu *point* kode etik jurnalistik mengatakan bahwa wartawan dan media harus mempunyai sikap independen kemudian, wartawan tidak boleh membuat konten *hoax*, sadis, dan berbau seksual (Munir, 2017, para. 9).

2.2.4 Diskriminasi

Effendi & Prasetyadji (2008) berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, diskriminasi adalah :

“Setiap Pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Diskriminasi adalah pemisahan hak kebebasan terhadap suatu kelompok masyarakat (Effendi & Prasetyadji, 2008, p. 37). Diskriminasi kerap terjadi pada kelompok minoritas di sebuah wilayah. Kelompok tertentu melakukan pembatasan ruang gerak terhadap kelompok lainnya, yaitu membatasi hak sipil hingga hak privasi kelompok minoritas. Diskriminasi terbagi dua kategori yaitu, langsung dan tidak langsung.

Diskriminasi tidak langsung adalah diskriminasi yang dilakukan melalui kebijakan yang, dibuat oleh kelompok dominan. Kebijakan tersebut dapat merugikan suatu kelompok yang mengakibatkan pembatasan ruang gerak suatu kelompok dan cenderung menguntungkan kelompok dominan (Liliweri, 2018, p. 82). Kelompok dominan menggunakan situasi dan menyudutkan kelompok minoritas. Peraturan tersebut membatasi ruang gerak suatu kelompok yang, mengakibatkan konflik antar suku di suatu wilayah.

Pemerintah Orde Baru membuat aturan hukum mengenai pelarangan ekspresi budaya etnis Tionghoa. Kebanyakan etnis Tionghoa mengubah nama dan perlahan mulai melupakan budaya leluhur. Etnis Tionghoa mengasimilasi identitas menjadi, identitas sebagai orang Indonesia sesungguhnya (Ang, 2001, p. 27). Akibatnya hak-hak sipil etnis Tionghoa di Indonesia menjadi terbatas. Seperti orang Tionghoa tidak boleh menjadi pegawai negeri sipil dan sulit untuk melakukan administrasi kewarganegaraan. Kebanyakan etnis Tionghoa beralih menjadi pengusaha namun, keberadaannya sulit diterima oleh masyarakat.

Motif diskriminasi Tidak langsung tidak disadari oleh agen karena, agen tersebut tidak menyadari tindakan diskriminasi yang dilakukan. Tindakan diskriminasi terlihat dari perlakuan agen terhadap korban. Tindakan diskriminasi tidak hanya terjadi pada ras dan agama bisa juga terjadi pada kelas sosial, gender, dan hak politik (Liliweri, 2018, p. 82). Diskriminasi langsung adalah tindakan yang terjadi secara eksplisit yang dilakukan, oleh kelompok dominan terhadap kelompok non dominan

Diskriminasi bisa berujung pada pelanggaran HAM yaitu, genosida yang dilakukan kelompok tertentu untuk menghilangkan kelompok lain. Alasannya menghilangkan keberadaan kelompok lain demi kepentingan kelompok lainnya. Genosida adalah jenis diskriminasi secara langsung melalui tindak kekerasan (Ling, 2014, p.18).

Agen atau diskriminator memperlakukan atribut pribadi seperti tampilan fisik, jenis kelamin, dan usia. Etnis Tionghoa memiliki ciri fisik khusus yaitu kulit bersih dan mata sipit. Perbedaan fisik menjadi halangan bagi etnis Tionghoa untuk berbaur dengan pribumi dan, tak jarang ciri fisik menjadi objek diskriminasi selain stereotip. Selain itu diskriminasi kelas sosial oleh pribumi yang menganggap etnis Tionghoa hanya ahli dibidang ekonomi. (Ang, 2001, p. 37) .

Etnis Tionghoa juga memiliki peran dalam memajukan pers di Indonesia. Awal abad ke 20 adalah kebangkitan pers peranakan ditandai dengan munculnya koran *Sin Po*. *Sin Po* berhenti terbit tahun 1965 karena isu PKI yang sedang marak. Rezim OB melarang aspek yang berhubungan dengan Tionghoa hal tersebut, berdampak terhadap etnis Tionghoa yang bekerja di dunia pers. (Suryadinata, 2010, p. 347). Masyarakat yang sulit menerima etnis Tionghoa dan melakukan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa . Puncaknya pada 1998 diskriminasi semakin menjadi hingga berujung pada penjarahan toko dan pelecehan seksual. Jurnalis *Forum Keadilan* hampir menjadi bulan-bulanan massa, hanya karena keturunan Tionghoa (Gustafsson, 2014, para.3).

Memasuki reformasi diskriminasi terhadap wartawan etnis Tionghoa masih terjadi. Seperti yang dialami oleh Asiong wartawan asal Medan yang, mengalami

diskriminasi oleh media sendiri. Asion mengatakan jika berita yang dibuat kerap tak dinaikkan oleh redaktur terutama, berita mengenai etnis Tionghoa (Song T.K, *personal communication* , 26, Mei, 2020).

2.2.5 Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia

Peristiwa berdarah geger Pecinan tahun 1740 adalah peringatan keras kepada etnis Tionghoa. Pemerintah Hindia Belanda membantai etnis Tionghoa dalam sebuah benteng besar. Tentara Belanda menyerang etnis Tionghoa hingga mati, orang Tionghoa yang terjebak terpaksa menggantung diri supaya selamat (dalam Kemasang, 1985, p. 73 – 74 sebagaimana yang dikutip oleh Dawis, 2010, p. 24).

Pada mulanya pejabat Belanda memosisikan etnis Tionghoa sebagai rekan bisnis. Namun hubungan baik antara Belanda dan Tionghoa tidak berlangsung lama, peristiwa ini dinamakan Geger Pecinan yang menewaskan lebih dari 10.000 etnis Tionghoa di Batavia (Dhani, 2016, para. 4 – 5). Sentimen terhadap etnis Tionghoa berlanjut di kalangan bangsawan Jawa. Tahun 1825 di Ngawi, Jawa Timur terjadi pembantaian etnis Tionghoa oleh Raden Ayu Yudakusuma. Raden Ayu adalah putri Sultan Hamengkubowono I (Dhani , 2016, para. 8).

Pada Kongres Pemuda II tahun 192 di jalan Kramat, Jakarta Pusat pemuda etnis Tionghoa turut ambil bagian dalam kongres tersebut. Pemuda tersebut adalah Sie Kong Liong, Kwee Thiam Hoey, Oey Kay Siang, dan Tjio Djin Kwie (Putri, n.d). Kemudian menjelang kemerdekaan etnis Tionghoa juga terlibat dalam organisasi BPUPKI (Badan

Penyelidik Usaha – Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia), empat orang tersebut adalah Liem Koen Hian, Oey Tiang Tjoei, Oey Tjong Haw, dan Tan Eng Hoa (Putri, n.d). Hal tersebut menunjukkan bahwa etnis Tionghoa mulai mengambil peran dalam peristiwa – peristiwa penting di Indonesia.

Namun setelah Indonesia merdeka sentimen terhadap etnis Tionghoa masih berlanjut. Pada Mei - Juni 1946 terjadi gerakan anti Tionghoa di Tangerang. Setahun berikutnya di Medan dan Palembang juga terjadi peristiwa serupa. Gerakan anti Tionghoa mengalami puncaknya pada tahun 1965, dimana isu PKI meluas setelah peristiwa G30/S. Genosida terhadap etnis Tionghoa terjadi di Medan dan Makassar tahun 1965, ribuan nyawa melayang karena tuduhan yang tidak benar (Isnaeni, n.d).

Peristiwa serupa terjadi tahun 1998 saat Soeharto lengser. Etnis Tionghoa menjadi korban pelanggaran HAM dan penjarahan massa. Pada 13 – 15 Mei 1998 di wilayah Cempaka Putih, Daan Mogot, dan Glodok ruko – ruko milik etnis Tionghoa dibakar dan dijarah oleh massa (Isnaeni, n.d). Selain pelanggaran HAM perempuan dari etnis Tionghoa mengalami pemerkosaan. Hingga saat ini tidak diketahui siapa pelaku dari peristiwa tersebut. Dengan demikian etnis Tionghoa masih menjadi target utama dalam kondisi krisis negara (Isnaeni, n.d).

Gambar 2.1

Infografik sentimen terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia



Sumber gambar : *tirto.id*

Diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia terjadi sejak kolonial Belanda. Etnis Tionghoa kerap diperlakukan tidak adil karena identitas sebagai etnis minoritas.

Perilaku diskriminatif muncul akibat kondisi sosial politik negara yaitu, etnis Tionghoa diasosiasikan memiliki kedudukan yang lebih tinggi (Dawis, 2010, p. 24).

Etnis Tionghoa dikenal sebagai penguasa dibidang perekonomian. Etnis Tionghoa melahirkan pengusaha – pengusaha besar di Indonesia. Pengusaha dari Etnis Tionghoa memiliki peran strategis dalam memajukan ekonomi makro (Musianto, 2003, p. 197). Kesuksesan etnis Tionghoa di bidang ekonomi tidak disukai oleh sebagian masyarakat. Maka dari itu timbul keirian sosial terhadap etnis Tionghoa dan menyebabkan perilaku diskriminasi.

Secara umum etnis Tionghoa digambarkan sebagai kelompok kaya, egois, eksklusif dan oportunistik. Beberapa etnis Tionghoa telah melegalkan praktik bisnis yang kotor. Namun tidak semua etnis Tionghoa digambarkan demikian. Etnis Tionghoa yang sebenarnya adalah korban tak berdaya dalam praktek korupsi (Ling, 2014, p. 18). Etnis Tionghoa kerap menjadi kambing hitam dari kondisi sosial politik negara (Dhani, 2016 , para. 19).

Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa terjadi karena dua agen. Agen Pertama adalah negara itu sendiri. Setelah peristiwa G30/S meletus terjadi genosida terhadap etnis Tionghoa di beberapa daerah. Tahun 1965 genosida terjadi di Medan dan Makassar, dua tahun kemudian terjadi peristiwa mangkuk merah di Kalimantan Barat (Isnaeni, n.d).

Sejak saat itu muncul aturan mengenai larangan ekspresi budaya Tionghoa. Akibatnya etnis Tionghoa mulai meninggalkan budaya dan mengganti nama menjadi Indonesia. Dengan demikian negara turut menyulut sentimen dan melakukan segregasi identitas etnis Tionghoa (Dhani, 2016, para. 15). Namun perubahan identitas etnis Tionghoa tidak diterima oleh masyarakat. Sebagai agen kedua masyarakat melakukan hal serupa dengan pemerintah.

Keberadaan etnis Tionghoa di tengah kalangan pribumi sulit diterima. Faktor stereotip dan kebencian dari masa lalu sudah mengakar di tengah masyarakat. Akibatnya masyarakat menganggap etnis Tionghoa sebagai kelompok eksklusif, korup, dan oportunis (Ling, 2014, p. 18). Selain itu aturan pemerintah turut mendukung sentimen di tengah masyarakat. Kebencian terhadap etnis Tionghoa menimbulkan diskriminasi hingga kasus pelanggaran HAM.

Sampai saat ini kebencian rasialis masih kerap terjadi. Bermula dari segregasi identitas bahwa etnis Tionghoa adalah orang asing dan tidak memiliki hak yang sama (Dhani, 2016, para. 19). Saat ini etnis Tionghoa di Indonesia masih mencoba menghilangkan stereotip, salah satunya turut berperan di bidang pers sebagai wartawan. Dengan demikian wartawan Tionghoa turut mewakili suara kaum marginal.

2.3 Alur Penelitian

Fenomena diskriminasi terhadap jurnalis etnis Tionghoa menjadi fokus peneliti. Tindakan rasisme pernah dialami oleh wartawan *Forum Keadilan* tahun 1998,

saat itu wartawan bernama Sen Sen meliput kerusuhan di Slipi. Jika tidak bermodalkan kartu pers, Sen Sen menjadi bulan-bulanan massa pada saat itu (Gustafsson, 2014, para.3). Setelah orde baru jurnalis etnis Tionghoa masih ada yang mengalami hal serupa. Asiong wartawan harian *Andalas* Medan mengalami diskriminasi yang dilakukan oleh media sendiri. Berita yang dibuat Asiong kerap tidak dinaikkan terutama, berita mengenai etnis Tionghoa di Medan (Song TK, *Personal Communication* , 9, Mei, 2020).

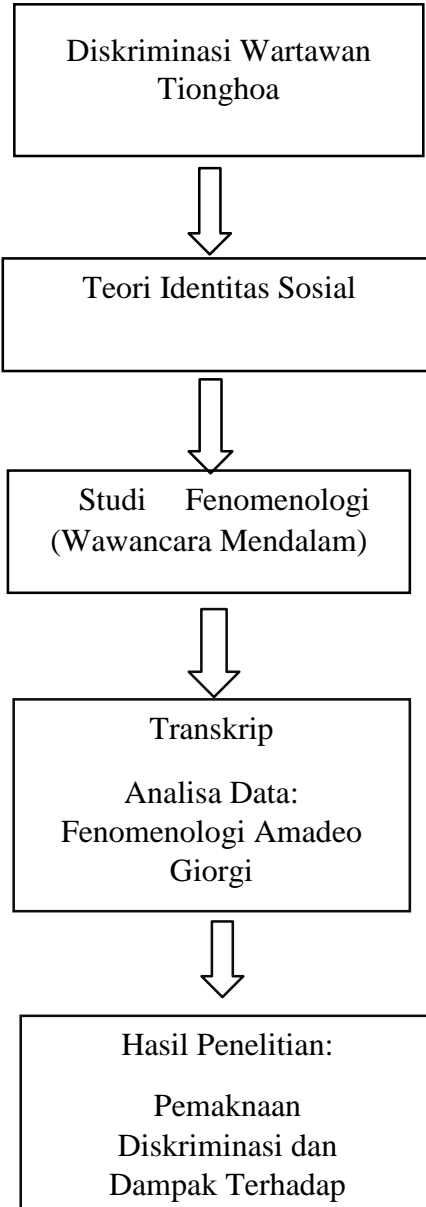
Tindakan diskriminasi yang dialami oleh dua jurnalis keturunan Tionghoa adalah bukti, jika diskriminasi masih terjadi hingga era reformasi. Faktor perbedaan fisik dan pengalaman masa lalu, menjadi akar permasalahan yang sulit diselesaikan. Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui bagaimana jurnalis keturunan Tionghoa, menggali kesadaran jati diri melalui profesi sebagai jurnalis dan apakah diskriminasi membuat rasa trauma tertentu. Konsep yang digunakan peneliti adalah wartawan, diskriminasi, dan konsep diri.

Larkin & Flowers (2009) pendekatan fenomenologi adalah pendekatan secara filosofis untuk, penelitian tentang pengalaman yang dialami oleh seseorang. Pengalaman harus diteliti dengan memperhatikan bagaimana pengalaman itu terjadi (Larkin & Flowers, 2009, p.11 dalam Kahija, 2017, p.33). Peneliti menggunakan pengalaman informan untuk, digunakan sebagai jawaban pertanyaan penelitian dan rumusan masalah. Peneliti menggunakan tiga *key* informan untuk, mendapatkan sudut pandang berbeda mengenai identitas etnis Tionghoa dan profesi sebagai jurnalis.

Tahap pengkodean peneliti melakukan analisis terhadap makna, pernyataan, perilaku, peristiwa, perasaan, tindakan dari informan dan semua itu bergantung dalam segmen yang dihadapi oleh informan. Hal yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah mengetahui apa yang terjadi disini kemudian, asumsi apa yang disampaikan oleh informan lewat pernyataan yang diberikan oleh informan. Secara esensial, apa sebenarnya yang sedang informan lakukan (Anggito & Johan, 2018, p. 236).

Bagan 2.2

Alur Penelitian Kualitatif



Sumber: Yordania,2020

